



**PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
INDONESIA (ZEEI)**

TESIS

ANTO PURWANTO

NRP : 1720622096

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

2021



**PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
INDONESIA (ZEEI)**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

ANTO PURWANTO

NRP : 1720622096

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Anto Purwanto
NRP : 1720622096
Tanggal : 26 Januari 2021

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia di tuntut dan di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, Januari 2021

Yang Menyatakan,



Anto Purwanto

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta , saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anto Purwanto
NRP : 1720622096
Program Studi : Magister Hukum

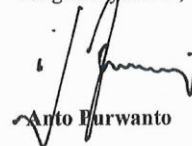
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exseclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PENERAPAN SANKSI DENDATERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI)**. Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pata Tanggal : Januari 2021

Yang Menyatakan,


Anto Purwanto


PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :
Nama : ANTO PURWANTO
N R P : 1720622096
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tesis : "PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN DI
WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
INDONESIA (ZEEI)"

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.



Dr. Atik Wihanti, SH, MH.
Ketua Penguji


Dr. Handoyo Prasetyo, SH, MH.
Penguji /Pembimbing I


Prof. Dr. Agus Sureno, SH, MH.
Penguji /Pembimbing II


Dr. Abdul Halim, M. Ag
Dekan




Dr. Benharmoni, SH, ILM.
Ka. Prodi

Abstrak

Indonesia memiliki luas laut dua pertiga dari daratan dan memiliki hak untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* demi mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya, namun penegakan hukum di wilayah Zona Eksklusif Indonesia (ZEEI) belum berjalan efektif karena pelakunya hanya dapat dikenakan sanksi pidana denda tanpa subsider. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 dalam Undang-Undang Perikanan, apakah pertimbangan yuridis dalam penanganan perkara perikanan dan kendala apa dalam penerapan sanksi denda bagi pelaku tindak pidana *illegal fishing* di ZEEI. Tipe penelitian ini yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan penerapan penjara dalam Konvensi PBB telah diadopsi Pasal 102 UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, putusan yang hanya menerapkan denda tanpa subsider kurungan dapat menimbulkan permasalahan hukum apabila terpidana tidak membayar denda. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut Mahkamah Agung melakukan kajian terhadap Pasal 102 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pemerintah RI melalui kementerian luar negeri mewujudkan kerja sama penegakan hukum di wilayah ZEEI dan Kejaksaan RI diberikan kewenangan untuk melakukan gugatan terhadap terpidana *Illegal fishing* yang tidak mau membayar pidana denda.

Kata kunci : Tindak pidana perikanan, pidana denda, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Abstract

Indonesia has two-thirds sea area which has the right to enforce the law against perpetrators of illegal fishing in order to realize justice, prosperity and welfare of its people. However law enforcement in the Indonesian Exclusive Zone (ZEEI) has not been effective because the perpetrators can only be subjected to sanctions criminal fines without subsidiary. This research was conducted to determine how the implementation of the 1982 UN Convention on the Law of the Sea in the Fisheries Law, what are the juridical considerations in handling fisheries cases and what are the obstacles in the application of fines for illegal fishing offenders in ZEEI. This type of juridical normative research was descriptive analysis. The results showed that the prohibition on imprisonment in the UN Convention has been adopted by Article 102 of Law No. 31 of 2004 concerning Fisheries, a decision that only applies a fine without a subsidiary to imprisonment can cause legal problems if the convict does not pay the fine. Efforts to solve this problem the Supreme Court conducted a study on Article 102 of Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, the Government of Indonesia through the ministry of foreign affairs created law enforcement cooperation in the ZEEI area and the Indonesian Attorney General was given the authority to file a lawsuit against convicted illegal fishing pay a criminal fine.

Key words : *fisheries crime, fines, Indonesian Exclusive Economic Zone*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan pertolongan-Nya penulis berhasil menyelesaikan Tesis. Judul yang dipilih dalam Tesis ini adalah “Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)”.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak dan Ibu Dosen yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuannya, semoga ilmu pengetahuan yang telah Bapak dan Ibu Dosen berikan menjadi amal jariyah dan ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Pembimbing dan tenaga Administrasi yang senantiasa memberikan bimbingan dan dukungannya kepada penulis, selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua, Istri, keluarga dan teman-teman semuanya yang tidak henti-hentinya memanjatkan doa dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian Tesis, sehingga penulisan Tesis ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan semoga segala amal baik yang Bapak, Ibu dan teman-teman lakukan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan yang lebih baik lagi dari Alloh SWT .

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih banyak terdapat banyak kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan, sehingga Penulis dapat meningkatkan keterampilan dalam penulisan karya ilmiah guna mewujudkan hasil yang lebih baik dan bermanfaat.

Jakarta, Januari 2021

Penulis

Anto Purwanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	v
ABSTRAK BAHASA INGGRIS.	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Permasalahan	4
I.3. Ruang Lingkup Penelitian	4
I.4. Tujuan Penelitian	4
I.5. Manfaat Penelitian	5
I.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	5
I.7. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
II.1. Penelitian Terdahulu	11
II.2. Peraturan Perundang undangan di Bidang Perikanan	13
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
III.1. Tipe Penelitian	18
III.2. Sifat Penelitian.	18
III.3. Sumber Data	18
III.4. Metode Pengumpulan Data	18
III.5. Teknik Analsa Data	19
BAB IV PEMBAHASAN	
IV.1. Tindak Pidana di Bidang Perikanan	20
IV.2. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	21
IV.3. Penyidikan Tindak Pidana Perikanan	25
IV.4. Penuntutan Tindak Pidana Perikanan	
IV.5. Pengadilan Perikanan	32
IV.6. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	33
IV.7. Kategori Tindak Pidana di Bidang Perikanan.....	35
IV.8. Tindak Pidana Perikanan di Zona Ekonomi Ekelusif Indonesia	42
IV.9. Sanksi Pidana	65
IV.10. Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan	67
IV.11. Putusan Pengadilan	69
IV.12. Penerapan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 dalam Undang Undang Perikanan di Indonesia	77
IV.13. Pertimbangan yuridis penerapakan sanksi denda dalam	

perkara tindak pidana perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)	
IV.14. Permasalahan penerapan sanksi pidana denda bagi pelaku tindak pidana <i>illegal fishing</i> di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)	85
	90
BAB V PENUTUP	
V.1. Kesimpulan	95
V.2. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x